



Jelang PSB, Awas Pungutan Liar

Sekolah Dilarang Menerima Penitipan Berkas

JOGJA – Sesuai amanat undang-undang, biaya sekolah SD dan SMP harus bebas dari pungutan kepada orang tua. Negara menanggung semua biaya pendidikan, termasuk uang pengelolaan dan pemban-

gunan gedung sekolah. Tapi mendekati penerimaan siswa baru (PSB) tahun ini, sekolah rawan melakukan penyimpangan dengan menarik sejumlah uang gedung dari orang tua yang menitipkan anaknya.

Kekhawatiran ini muncul dari Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan (Sarang Lidi) ■

► *Baca Jelang... Hal 23*

Dinas Pendidikan Siap Terjunksan Pengawasa

■ **JELANG**

Sambungan dari hal 13

Perkumpulan yang terdiri dari beberapa wali murid ini mengingatkan semua pihak, terutama orang tua, untuk mengkritisi rekrutmen di SD negeri.

Bambang Sulisty, ketua umum Sarang Lidi menyatakan, praktik memungut uang gedung sudah dilakukan bertahun-tahun. Meski pendidikan gratis sudah diberlakukan Pemkot Jogja sejak Januari tahun ini, kesempatan melakukan penyimpangan tetap terbuka lebar. Hal ini terutama dilakukan mereka yang mendaftar sebelum waktunya.

"Sekolah bisa memungut uang gedung mulai dari Rp 500 –Rp 1 juta kepada tiap wali murid yang menitipkan anak sebelum PSB

resmi dimulai. Ini jelas menyimpang dari undang-undang," tuturnya kemarin (15/5).

Menarik uang gedung dari orang tua siswa, menurutnya termasuk pungutan liar. "Meski sudah ada undang-undang pendidikan gratis, tetap saja besar kemungkinan beberapa sekolah tetap menarik uang gedung saat anak mau masuk SD," ujarnya. Karena itu, dia berharap semua orang tua dan dinas pendidikan kota Jogja ketat mengawasi dan mengontrol proses PSB SD.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Syamsuri menyatakan siap menerjunkan pengawas untuk mengawal proses PSB. Sesuai aturan yang berlaku, dia melarang keras sekolah negeri menarik uang gedung dari orang tua. "Sebenarnya, membuka

penitipan berkas saja sudah tidak benar. Apalagi sampai menarik uang gedung," ujarnya.

Dinas pendidikan, lanjutnya, sekali lagi mengimbau orang tua dan sekolah tidak terburu-buru membuka pendaftaran atau penitipan berkas. "Prosedur dan waktu pelaksanaan kan sudah ditetapkan. Orang tua sebaiknya menahan diri, agar tidak menimbulkan celah pungutan liar terjadi," tegasnya.

Syamsuri mengaku belum menerima laporan sekolah mana saja yang menerima penitipan berkas dan menarik uang gedung dari orang tua. Jika ditemukan sekolah yang menarik uang gedung, pihaknya akan memberi teguran. "Sanksi pasti ada, tapi kita tegur dahulu. Jadi bisa diselesaikan secara internal," paparnya. (luf)

an Kepada Yth. :
 Walikota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005